

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief. Shidarta, *Karakteristik Penaiaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Jakarta: CV Utomo, 2006.

Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi Di Tinjau Dari hukum Pidana*. PSHP. Universitas Trisakti Jakarta. 2001.

Blum, Jack A., *"Recovering Dictator's Plunder"*, kesaksian di depan The Committee on Financial Services Subcommittee on Financial Institutions and Consumer Credit U.S. House of Representatives; 9 Mei, 2002,

Chazawi Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. PT Alumni 2008.

Dani Darmodiharjo (at.al.), *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Cet.2, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996

Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Padang: Angkasa Raya Padang, 1992.

Fleming, Matthew H., *Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behavior, An Economic Taxonomy: Draft for Comments, Version Date*, London: University College, 2005

Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Friedmann, Lawrence M., *Teori & Filsafat Hukum*, ed. Terj. Rajawali Pers, Jakarta, 1990.

_____, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis & Problema Keadilan (Susunan II)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.

- Harjito Notopuro, *Pokok-Pokok Pifeiran tentang Pembangunan dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta, 1995.
- Husein, Yunus, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung: Books Terrace & Library, 2007.
- IGM. Nurdjana, *Korupsi dalam Praktik bisnis*. Jakarta: Gramedia pustaka Utama , 2005
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media, 2009
- Johny Ibrahim. *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publisng. Malang. Jawa Timur. 2007.
- Lawrence M. Friedman. *American Law*. WW. Norton Company, New York. 1984.
- Lili Rasjidi (at.al.), *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung. CV. Mandar Maju. 2003.
- Lilik Mulyadi. *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Putusan Pengadilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang Nomor 31 Tahun1999)*. Bandung. PT. Citra Aditya /bakti. 2000.
- _____. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. PT Alumni 2007.
- Lindy, Michelle Morales, Marianne Mathias, Tammar Berger, *Illicit Enrichment*, The World Bank, 2012.
- Lubis, T. Mulya, *Hak Asasi Manusia dan Dilema Politik Hukum di Indonesia Pada Masa Orde Baru 1996-1990*, Jakarta: YLBHI, 1994.
- Mardjono Reksodiputro (b), *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan*, Buku Kelima. Jakarta: PPKPH universitas Indonesia, 2007.

- M. Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi, Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Jakarta: Q-Communication, 2006.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2000
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989.
- Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi; Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, Cetakan Pertama, 2002,
- _____, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kedua, Alumni, Bandung, 2003.
- Muhammad Yusuf, *Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana: Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Jakarta. Pustaka Juanda Tigalima, 2012
- _____, *Miskinkan Koruptor: Pembuktian Terbalik Solusi Yang Terabaikan*. Jakarta. Pustaka Juanda Tigalima, 2013.
- Nijboer, J.F., *Comparative Criminal Law and Procedures: An Introduction*, Kluwer, 2005,
- Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Bandung: Armico, 1987.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi.*, Jakarta: Alumni, 2007.

- Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Roscoe Pound, *An Introduction to The Philosophy of Law*, New Haven: Yale University Press, 1959.
- Semma, Mansyur, *Negara Dan Korupsi; Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008
- Soetnadyo Winjoseobroto. *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Elsam-Huma. Jakarta.2002.
- Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHPA Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Edisi 4. Jakarta: Rajawali Pers,
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cetakan 26, Jakarta: Intermasa, 1994.
- SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996.
- T. Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Dilema Politik Hukum di Indonesia Pada Masa Orde Baru 1996-1990*, Jakarta: YLBHI, 1994.
- UNODC, *United Nations Convention against Corruption: Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa Mengenai Anti Korupsi*, Jakarta: United Nations, 2009.
- U.S.Department of Justice, Criminal Division, “*Civil and Criminal Forfeiture Procedure*“, April: 2008, Part 1, hlm. 1 dan Part 2..
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989.
- Yesmil Anwar .*Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo, 2008

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang –Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,

C. Sumber Lain

1. Jurnal/Desertasi/Tesis/Makalah/Majalah.

Adji, Indriyanto Seno, "Kendala Pencucian Uang Terhadap Administrative Penal Law Sebagai Tindak Pidana Korupsi", Makalah dalam *Workshop "Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan"*, yang dilaksanakan oleh PPATK bekerjasama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jakarta, 9 Juni 2009.

Ariawan, I Gusti Ketut, "Stolen Asset Recovery Initiative, Suatu Harapan Dalam Pengembalian Aset Negara", *Jurnal Unud Kertha Patrika* Vol. 33 No. 1, 2008.

Atmasasmita, Romli, "Tiga Paradigma Hukum Pembangunan Nasional" *Makalah Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2010, _____, "Kebijakan Hukum Kerjasama Di Bidang Ekstradisi Dalam Era Globalisasi: Kemungkinan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi". Makalah dalam Seminar sehari bertema: Perlunya Perubahan UU Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi. Diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung RI: tanggal 27 Nopember 2007 di Jakarta.

_____, "Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi", disampaikan dalam Seminar "Pembuktian Terbalik dan Transaksi Keuangan Non-Tunai: Strategi Baru Pemberantasan Korupsi; diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, tanggal 12 September 2011.

_____, "Perampasan Aset melalui Pembuktian Terbalik: Studi Perbandingan Hukum Pidana", Focus Group Discussion (FGD) Pembuktian Terbalik, Jakarta: Hotel Borobudur, 2010.

Eddy OS Hiariej, "*Asset Recovery dan Money Laundering*". Makalah pada seminar dalam rangka Dies Natalis ke-53 Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Jogjakarta, 2007,

Edy Siong, *Rekaman Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang*, Tesis, (Medan: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010

- Husein, Yunus, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 7 No.4, Desember 2010.
- I Gusti Ketut Ariawan, "Stolen Asset Recovery Initiative, Suatu Harapan Dalam Pengembalian Aset Negara", dalam *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 33 No. 01, Bali, Januari 2008.
- Indonesia Corruption Watch (ICW), "Independent Report, Corruption Assessment and Compliance United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)-2003 in Indonesian Law", 2007.
- Lilik Mulyadi., "Pembalikan Beban Pembuktian Korupsi dan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (Bagian IV)", Artikel dalam Media Online Gagasan Hukum, Diterbitkan oleh Slamet Hariyanto & Rekan-Advokat, Konsultan Hukum dan Politik.
- Lubis, Todung Mulya, "Memerangi Korupsi di Peradilan Dari Sisi Advokat", Makalah pada Seminar *Anti Corruption Summit* yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 11-12 Agustus 2005.
- M. Yusuf . Desertasi. *Kebijakan Hukum Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*
- Oka Mahendra, "Kerjasama Bantuan Timbal Balik Dalam Pengembalian Aset Korupsi", Makalah dalam Seminar *Sinergi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, Selasa 4 April 2006.
- Purwaning M Yanuar. Desertasi. *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*.2007.
- Romli Atmasasmita, "Strategi Dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003: Melawan Kejahatan Korporasi", *Paper*, Jakarta, 2006.
- Ruki, Taufiequrachman, "KPK dan Jejaring Internasional Rezim Anti Korupsi dalam Upaya Pengembalian Hasil Tindak Pidana Korupsi", makalah disampaikan pada Seminar "Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peranan

PPATK dan Tantangan *Asset Recovery*” dalam rangka Ulang Tahun ke-4 PPATK, Ruang Chandra, Gedung Bank Indonesia Lt. 6, Kebon Sirih, Jakarta, 4 April 2006.

Saleh, Abdul Rahman, “Peran Kejaksaan dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi”, makalah disampaikan pada Seminar “Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peranan PPATK dan Tantangan *Asset Recovery*” dalam rangka Ulang Tahun ke-4 PPATK, Ruang Chandra, Gedung Bank Indonesia Lt. 6, Kebon Sirih, Jakarta, 4 April 2006.

2. Internet

Iskandar, Eka, “Model Ideal Pengembalian Aset Hasil Korupsi”,
<<http://antikorupsi.org/indo/content/view/13152/7/>>.

Latief, Mujahid A., “Pengembalian Aset Korupsi via Instrumen Perdata”,
<http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=297235>.

Mulyadi, Lilik, “Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003”, ringkasan Disertasi,
<<http://pn-pandeglang.go.id/attachments/125asas%20beban%20pembuktian%20terhadap%20tipikor%20dalam%20hukum%20pidana%20indonesia.pdf>>.

Mudzakir, *Penelusuran, Penyitaan, Perampasan Dan Pengelolaan Aset Tindak Pidana*, Makalah sebagai bahan Focus Group Discussion (FGD) tentang Penyitaan dan Perampasan Aset untuk Mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Departemen bekerjasama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 21 Juli 2009, <http://www.legalitas.org/content/penelusuran-penyitaan-perampasan-dan-pengelolaan-aset-tindakpidana> , diakses terakhir tanggal 28 Maret 2015.

Nurmadjito, “Korupsi dan RUU Perampasan Aset”, , <http://www.pdk.or.id/2011/06/07/korupsi-dan-ruu-perampasan-aset/>.

Purwaning M. Yanuar, *Bukan RUU Perampasan Aset* , <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=232893> , diakses terakhir tanggal 21 April 2015.

Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, hal. 111-112. Lihat juga, Sosialisasi RUU tentang Perampasan Aset Tindak pidana <http://www.djpp.depukumham.go.id/harmonisasi-peraturanlainnya/43-sosialisasi/56-perampasan-aset.html> , diakses terakhir tanggal 19 April 2015.

United Nations Secretary-General in his statement on the adoption by the General Assembly of the *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC), <<http://www.unodc.org/unodc/en/corruption.html>>.

United State Agency International Agency (USAID), ”Corruption Assessment Handbook”, <<http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/USAIDCorAsmtHandbook.pdf>>.

Utama, Paku, “Terobosan UNCAC dalam Pengembalian Aset Korupsi Melalui Kerjasama Internasional”, <<http://www.hukumonline.com/>>.

Utama, Paku, “Terobosan UNCAC dalam Pengembalian Aset Korupsi Melalui Kerjasama Internasional”, 2008 <<http://www.hukumonline.com/>>.

Yunus Husein, *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia (Asset Forfeiture Of Crime In Indonesia)*, jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/7410563576.pdf, <http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Convention_against_Corruption#>.

<<http://www.assetrecovery.org/kc/node/c40081eb-7805-11dd-9c9d-d9fcb408df-ee.3,>>.

<http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?_asas%20praduga%20tak%20bersalah/%20presumption%20of%20innocence_&ident=9222>.

<<http://www.uncaccoalition.org/en/home/186-press-release-28-october-2011.html>>.

<http://www.unodc.org/pdf/crime-/convention_corruption/signing/Convention-e.pdf>.

<http://www.unodc.org/unodc/crime_signatures_corruption.html>.

< <http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html>>

<http://groups.yahoo.com/group/nasional>

list/message/62822,<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0601/09/nas10.html>,

Juli 2014.

<http://kontak.club.fr>, *Metanews.com*., "Kasus Gayus Diusulkan Dilebur",

[http://www.djpp.depkmham.go.id/pembahasan-ruu/80-ruuyang-di-bahas/607-ruu-tentang-perampasan -aset.html](http://www.djpp.depkmham.go.id/pembahasan-ruu/80-ruuyang-di-bahas/607-ruu-tentang-perampasan-aset.html)